

## Paradoks representasi kiai dan politik gender dalam novel Indonesia masa reformasi

### *The paradox of kiai representation and gender politics in Indonesian novels of the reformation era*

**Heru Marwata**

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Corresponding email: [heru\\_marwata@ugm.ac.id](mailto:heru_marwata@ugm.ac.id)

#### Article History

Received 6 January 2026

Revised 20 February 2026

Accepted 6 March 2026

Published 31 March 2026

#### Keywords

paradox of representation, kiai, gender politics, Reformasi, Indonesian novels.

#### Kata Kunci

paradoks representasi, kiai, politik gender, Reformasi, novel Indonesia.

#### Read online

Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online.



#### Abstract

This article aims to explain the paradox of the representation of the *kiai* (Islamic scholar/cleric) in Indonesian novels during the Reformation era, particularly in relation to gender politics. The 1998 Reformation not only shifted the national political configuration but also influenced the legitimacy of religious authority, including the regulation of women's bodies and agency. This study employs a qualitative approach through critical textual analysis of four novels: *Perempuan Berkalung Sorban*, *Ayat-Ayat Cinta*, *Negeri 5 Menara*, and *Kiai Tanpa Pesantren*. The theoretical framework utilizes Stuart Hall's theory of representation, specifically the encoding–decoding model, to examine hegemonic, negotiated, and oppositional positions of meaning within the construction of the *kiai* figure. The results indicate that the *kiai* is paradoxically represented as both a moral protector of women and a symbolic agent maintaining hierarchical gender structures. Post-Reformation social transformation has not dissolved religious authority but rather encouraged it to adapt into more moderate, disciplinary, or charismatic-cultural forms. This paradox underscores that literature functions as a symbolic arena where the relations between religion and gender are simultaneously produced, maintained, and contested within contemporary Indonesian Muslim society.

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan menjelaskan paradoks representasi kiai dalam novel Indonesia masa Reformasi, khususnya dalam relasinya dengan politik gender. Reformasi 1998 tidak hanya menggeser konfigurasi politik nasional, tetapi juga mempengaruhi legitimasi otoritas keagamaan, termasuk dalam pengaturan tubuh dan agensi perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis tekstual kritis terhadap empat novel: *Perempuan Berkalung Sorban*, *Ayat-Ayat Cinta*, *Negeri 5 Menara*, dan *Kiai Tanpa Pesantren*. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori representasi Stuart Hall, khususnya model *encoding–decoding*, untuk membaca posisi makna hegemonik, negosiatif, dan oposisional dalam konstruksi figur kiai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa figur kiai direpresentasikan secara paradoksal sebagai pelindung moral perempuan sekaligus sebagai agen simbolik yang mempertahankan struktur gender hierarkis. Transformasi sosial pasca-Reformasi tidak membubarkan otoritas religius, melainkan mendorongnya beradaptasi dalam bentuk yang lebih moderat, disipliner, atau karismatik-kultural. Paradoks tersebut menegaskan bahwa sastra berfungsi sebagai arena negosiasi simbolik tempat relasi agama dan gender diproduksi, dipertahankan, dan dipertanyakan secara bersamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

© 2026 The Author(s). Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya by Universitas Mulawarman

#### How to cite this article with APA style 7th ed.

Mawarta, H. (2026). Paradoks representasi kiai dan politik gender dalam novel Indonesia masa reformasi. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(1), 239–248. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v9i1.1783>



## A. Pendahuluan

Reformasi 1998 tidak hanya mengubah lanskap politik Indonesia, tetapi juga memengaruhi konfigurasi legitimasi otoritas keagamaan dalam ruang publik. Demokratisasi, kebebasan berekspresi, serta menguatnya diskursus hak asasi manusia dan kesetaraan gender mendorong lahirnya perdebatan baru mengenai posisi figur-figur religius dalam masyarakat. Dalam konteks Islam Indonesia, kiai yang sebelumnya diposisikan sebagai otoritas moral yang relatif stabil mulai mengalami proses negosiasi makna. Otoritas tersebut tidak serta-merta runtuh, tetapi dipertanyakan, ditafsir ulang, dan direposisi dalam medan sosial yang semakin plural dan terbuka.

Perubahan tersebut berkelindan dengan meningkatnya artikulasi isu gender dalam ruang publik pasca-Reformasi. Kritik terhadap praktik patriarki religius yang sebelumnya sering dinormalisasi atas nama tradisi dan kesalehan memperoleh ruang ekspresi yang lebih luas. Relasi antara otoritas keagamaan dan tubuh perempuan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam perdebatan tersebut. Tubuh, pilihan hidup, pendidikan, hingga peran sosial perempuan tidak lagi diterima sebagai wilayah yang sepenuhnya berada dalam regulasi moral laki-laki tanpa pertanyaan. Dalam situasi inilah figur kiai menjadi penting untuk dibaca kembali, bukan hanya sebagai tokoh religius, melainkan sebagai pusat produksi makna tentang kepantasan, kesucian, dan batas agensi perempuan.

Sastra Indonesia pasca-Reformasi memainkan peran signifikan dalam memediasi ketegangan tersebut. Novel, sebagai salah satu medium yang paling populer dan mudah diakses, tidak sekadar merefleksikan perubahan sosial, tetapi juga memproduksi dan mengedarkan cara pandang tertentu mengenai agama dan gender. Representasi figur kiai dalam novel menjadi arena simbolik tempat otoritas religius dinegosiasikan. Di dalam teks sastra, kiai dapat tampil sebagai penjaga nilai yang dihormati, sebagai figur humanis yang moderat, atau sebagai simbol struktur patriarki yang membatasi. Ambivalensi inilah yang menghadirkan kemungkinan pembacaan yang beragam.

Sejumlah penelitian telah membahas representasi perempuan dalam sastra Islam Indonesia dengan menekankan pengalaman subordinasi maupun resistensi (Umar, 2019; Nisa, 2020; Wati, 2022). Wati (2022) menunjukkan bahwa struktur relasi kuasa dalam narasi pesantren sering kali bekerja melalui legitimasi moral figur otoritas religius yang dipersepsikan sebagai penjaga nilai sosial. Dalam konteks tersebut, figur kiai tidak hanya berfungsi sebagai tokoh religius, tetapi juga sebagai mediator simbolik yang mengatur batas-batas kepantasan gender dalam narasi sastra. Kajian lain menyoroti transformasi pesantren dan dinamika otoritas keagamaan dalam konteks modernitas dan budaya populer (Halim, 2018; Jati, 2021; Heryanto, 2015). Meskipun demikian, figur kiai sebagai pusat legitimasi simbolik dalam konstruksi gender belum banyak dijadikan fokus utama dalam analisis representasional. Politik gender sering kali dibaca dari posisi perempuan sebagai subjek yang mengalami penindasan atau negosiasi, sementara mekanisme simbolik yang memproduksi norma dan batas kepantasan melalui figur otoritas religius belum sepenuhnya diurai secara sistematis.

Artikel ini berangkat dari celah tersebut dengan menempatkan figur kiai sebagai pusat analisis. Fokus penelitian bukan semata-mata pada bagaimana perempuan direpresentasikan, melainkan pada bagaimana kiai dihadirkan sebagai produsen dan penjaga makna gender dalam novel Indonesia masa Reformasi. Pertanyaan yang diajukan adalah: bagaimana paradoks representasi kiai dimunculkan dalam relasinya dengan politik gender, dalam bentuk apa ketegangan antara perlindungan moral dan kontrol patriarkal ditampilkan, serta bagaimana teks membuka kemungkinan pembacaan hegemonik, negosiatif, dan oposisional terhadap relasi tersebut.

Dengan menempatkan figur kiai sebagai pusat produksi makna, artikel ini tidak sekadar memindahkan fokus dari perempuan kepada laki-laki, tetapi juga menggeser titik analisis dari posisi korban menuju mekanisme legitimasi. Politik gender tidak lahir secara otonom, tetapi dimungkinkan oleh struktur simbolik yang memberi kewenangan kepada subjek tertentu untuk menentukan batas kepantasan. Dalam konteks ini, figur kiai berfungsi sebagai simpul ideologis yang menghubungkan teks sastra dengan wacana sosial tentang moralitas, tradisi, dan modernitas Islam.

Pembacaan semacam ini penting karena dalam banyak kajian sastra Islam Indonesia, figur otoritas religius cenderung diperlakukan sebagai latar kultural yang stabil, bukan sebagai entitas diskursif yang aktif memproduksi norma. Padahal, justru melalui figur tersebut, nilai-nilai tentang tubuh perempuan, kepatuhan, kesalehan, dan kehormatan dinegosiasikan secara terus-menerus. Dengan demikian, analisis terhadap kiai bukanlah analisis terhadap individu, melainkan terhadap struktur simbolik yang bekerja melalui individu tersebut.

Empat novel dipilih karena memperlihatkan spektrum representasi otoritas religius yang berbeda dalam konteks pasca-Reformasi: *Perempuan Berkalung Sorban* karya Abidah El Khalieqy, *Ayat-Ayat Cinta* karya Habiburrahman El Shirazy, *Negeri 5 Menara* karya Ahmad Fuadi, dan *Kiai Tanpa Pesantren* karya Imam Sibawaih El Hasany. Keempatnya tidak hanya populer dan berpengaruh dalam wacana publik tentang Islam dan pesantren, tetapi juga memperlihatkan variasi bentuk otoritas, dari institusional dan regulatif, hingga moderat dan karismatik-kultural. Melalui pembacaan komparatif terhadap keempat novel tersebut, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa Reformasi tidak membubarkan otoritas religius, tetapi mendorongnya beradaptasi dalam bentuk yang lebih subtil dan diskursif.

Dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall, khususnya model *encoding–decoding*, penelitian ini memandang teks sastra sebagai praktik produksi makna yang tidak netral. Representasi kiai bukan cermin langsung realitas sosial, melainkan hasil konstruksi ideologis yang membuka ruang interpretasi beragam. Pendekatan ini memungkinkan pembacaan terhadap paradoks representasi kiai sebagai figur yang secara bersamaan menjaga nilai moral dan mereproduksi struktur gender hierarkis. Di sinilah kontribusi artikel ini ditempatkan: memperlihatkan bahwa politik gender dalam sastra Indonesia masa Reformasi lebih tepat dipahami sebagai proses negosiasi simbolik daripada transformasi struktural yang tuntas. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperluas kajian representasi gender dalam sastra Indonesia, tetapi juga menawarkan pembacaan baru mengenai bagaimana otoritas religius dinegosiasikan secara simbolik dalam narasi sastra pasca-Reformasi.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tekstual kritis terhadap novel Indonesia masa Reformasi yang menampilkan figur kiai (dan simbol pemegang otoritas keagamaan) sebagai pusat otoritas moral. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur frekuensi kemunculan tema secara kuantitatif, melainkan untuk memahami bagaimana makna tentang kiai dan gender diproduksi, dinegosiasikan, dan dinormalisasi melalui struktur naratif, dialog, serta relasi antartokoh dalam teks sastra. Dengan demikian, fokus analisis diarahkan pada proses produksi makna, bukan pada perhitungan statistik representasi.

Objek penelitian terdiri atas empat novel yang terbit pada periode Reformasi dan secara eksplisit menghadirkan figur kiai atau otoritas religius sebagai elemen penting dalam cerita, yakni *Perempuan Berkalung Sorban* (2001), *Ayat-Ayat Cinta* (2004), *Negeri 5 Menara* (2009), dan *Kiai Tanpa Pesantren* (2019). Keempat novel tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan tematik dan historis. Secara tematik, masing-masing menampilkan relasi antara otoritas keagamaan dan konstruksi gender dalam bentuk yang berbeda. Secara historis, novel-novel tersebut merepresentasikan fase-fase perkembangan wacana Islam populer dan transformasi pesantren pasca-1998 sehingga memungkinkan pembacaan komparatif terhadap dinamika representasi dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori representasi Stuart Hall (1980; 1997), khususnya model *encoding–decoding*. Dalam perspektif Hall, representasi dipahami sebagai praktik kultural yang memproduksi makna melalui sistem tanda dan bahasa. Teks sastra tidak diperlakukan sebagai refleksi pasif realitas sosial, tetapi juga sebagai arena konstruksi ideologis yang memuat posisi makna dominan sekaligus membuka kemungkinan pembacaan alternatif.

Konsep *encoding* digunakan untuk melihat bagaimana pengarang menyusun figur kiai dalam kerangka moral tertentu, sedangkan konsep *decoding* membantu mengidentifikasi kemungkinan posisi pembacaan hegemonik, negosiatif, dan oposisional terhadap representasi tersebut.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Pertama, dilakukan pembacaan mendalam terhadap keseluruhan teks untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang merepresentasikan figur kiai dan atau pemegang otoritas keagamaan, baik melalui narasi langsung, dialog, deskripsi karakter, maupun relasi kuasa yang terbentuk dalam alur cerita. Kedua, bagian-bagian tersebut dianalisis dengan fokus pada relasinya dengan tubuh, peran, dan agensi perempuan. Perhatian diberikan pada penggunaan bahasa agama sebagai legitimasi moral, pembungkai kehormatan, serta mekanisme disiplin yang tampak dan yang tersirat. Ketiga, dilakukan pembacaan komparatif lintas novel untuk menemukan pola representasi yang konsisten maupun perbedaan ideologis yang signifikan.

Analisis tidak berhenti pada deskripsi karakter, tetapi bergerak pada penafsiran terhadap fungsi simbolik figur kiai dalam struktur cerita. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya “apa yang dilakukan kiai dalam teks”, melainkan “bagaimana teks membungkai tindakan tersebut sebagai wajar, mulia, problematis, atau ambigu”. Dengan pendekatan ini, paradoks representasi dapat dibaca sebagai ketegangan antara klaim perlindungan moral dan praktik regulasi gender yang dilegitimasi secara kultural.

Untuk menjaga ketelitian interpretasi, pembacaan dilakukan secara berulang dan kontekstual dengan mempertimbangkan wacana sosial pasca-Reformasi, termasuk diskursus moderasi beragama, transformasi pesantren, dan perkembangan Islam populer di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang tidak terjebak pada moral judgment, tetapi berupaya memahami bagaimana representasi bekerja dalam jaringan makna yang lebih luas.

Melalui kombinasi analisis tekstual kritis dan kerangka representasi Stuart Hall, metode ini dirancang untuk mengungkap bagaimana figur kiai dalam novel Indonesia masa Reformasi berfungsi sebagai pusat produksi makna gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk representasi, tetapi juga menjelaskan mekanisme ideologis yang menopangnya.

### C. Pembahasan

Pembacaan terhadap keempat novel menunjukkan bahwa figur kiai tidak pernah hadir sebagai representasi yang tunggal dan stabil. Ia selalu bergerak dalam ketegangan antara otoritas moral yang diakui dan relasi kuasa yang dinegosiasikan. Reformasi 1998 memang membuka ruang kritik terhadap otoritas keagamaan, tetapi dalam teks sastra, perubahan tersebut tidak selalu bermakna pembongkaran struktur legitimasi yang telah mapan. Sebaliknya, yang tampak adalah proses adaptasi dan reposisi otoritas dalam bentuk yang lebih subtil, lebih moderat, atau lebih kultural. Di sinilah paradoks representasi kiai menemukan konteksnya.

Dalam *Perempuan Berkalung Sorban*, figur kiai dihadirkan sebagai otoritas institusional yang memiliki legitimasi untuk menentukan batas kepantasan perempuan. Bahasa agama dan kehormatan keluarga menjadi perangkat utama dalam membungkai regulasi tubuh dan pilihan hidup tokoh perempuan. Larangan terhadap aktivitas tertentu (misalnya belajar naik kuda), pembatasan akses pendidikan, serta penekanan pada peran domestik disajikan bukan sebagai tindakan represif yang kasar, melainkan sebagai kewajiban moral yang dianggap wajar. Tubuh perempuan ditempatkan sebagai ruang yang harus dijaga demi stabilitas simbolik keluarga dan pesantren.

Regulasi tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk larangan eksplisit, tetapi juga dalam bahasa keseharian yang tampak sederhana meskipun sarat makna normatif. Ketika kehormatan keluarga disandingkan dengan kepatuhan perempuan, teks memperlihatkan bagaimana moralitas bekerja melalui internalisasi rasa bersalah dan rasa takut melanggar batas. Tubuh perempuan bukan sekadar dikontrol dari luar, tetapi dibentuk untuk mengawasi dirinya sendiri. Dalam konteks ini,

disiplin tidak selalu membutuhkan kekerasan terbuka. Disiplin bekerja melalui pembiasaan dan legitimasi simbolik yang terus diulang, baik dalam ruang domestik maupun religius.

Namun, narasi tidak berhenti pada legitimasi tersebut. Melalui pengalaman batin tokoh perempuan, teks memperlihatkan adanya jarak antara norma yang ditetapkan dan rasa keadilan yang dirasakan. Kesadaran kritis yang muncul dari dalam pengalaman personal menghadirkan kemungkinan pembacaan negosiatif bahkan oposisional terhadap makna dominan yang di-encode oleh otoritas kiai. Di sinilah paradoks bekerja secara terang: kiai tetap dihormati sebagai penjaga nilai, tetapi sekaligus menjadi simbol sistem patriarki religius yang membatasi agensi perempuan. Perlindungan moral dan kontrol simbolik berjalan beriringan tanpa saling meniadakan.

Jika dalam novel *Abidah El Khalieqy* kontrol hadir dalam bentuk yang relatif eksplisit, novel *Ayat-Ayat Cinta* menampilkan konfigurasi yang berbeda. Otoritas religius dalam novel ini dibingkai melalui wacana moderasi, empati, dan kesantunan. Figur ulama atau tokoh religius tidak tampil sebagai sosok yang keras atau represif, tetapi sebagai pembimbing yang humanis. Perempuan dihormati, dilindungi, dan diposisikan sebagai subjek yang bernilai. Namun, relasi yang terbentuk tetap bersifat hierarkis. Bahasa perlindungan dan penghormatan tidak serta-merta menghapus struktur paternalistik yang menempatkan laki-laki sebagai pusat legitimasi moral.

Moderasi beragama dalam konteks ini berfungsi sebagai mekanisme pelunakan hierarki. Ketimpangan tidak lagi dinyatakan melalui larangan langsung, tetapi melalui pembungkaman etis yang terasa wajar dan penuh empati. Dalam posisi pembacaan hegemonik, representasi ini dapat dipahami sebagai bentuk Islam yang progresif dan ramah perempuan. Akan tetapi, pembacaan kritis memperlihatkan bahwa struktur legitimasi tetap terjaga. Kesetaraan dibicarakan dalam ranah etika personal, bukan dalam transformasi relasi kuasa yang mendasar. Paradoks muncul dalam bentuk yang lebih halus: moderasi menjadi strategi adaptif yang memungkinkan keberlanjutan otoritas religius tanpa harus tampil represif.

Ambivalensi ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama dalam teks tidak sepenuhnya identik dengan kesetaraan struktural. Bahasa empati dan perlindungan memang mengurangi kesan represif, tetapi pada saat yang sama memperkuat legitimasi laki-laki sebagai mediator nilai. Perempuan diberi ruang untuk berbicara dan memilih, tetapi pilihan tersebut tetap bergerak dalam koridor moral yang telah ditentukan. Dalam pembacaan semacam ini, novel memperlihatkan bahwa transformasi simbolik lebih mudah diterima dibandingkan dengan transformasi relasional yang radikal. Dengan kata lain, perubahan hadir dalam tingkat retorika etis, bukan dalam redistribusi otoritas.

Konfigurasi yang berbeda tampak dalam *Negeri 5 Menara*. Novel ini tidak secara eksplisit menampilkan konflik gender atau regulasi tubuh perempuan, tetapi justru dalam ketidakhadiran problematisasi itulah politik gender bekerja. Pesantren digambarkan sebagai ruang pembentukan karakter laki-laki yang disiplin, visioner, dan berorientasi global. Perempuan hampir tidak menjadi pusat narasi, dan relasi gender tidak pernah menjadi persoalan utama yang diperdebatkan. Struktur maskulin diterima sebagai kondisi yang wajar.

Ketidakhadiran tersebut bukan sekadar pilihan estetik, melainkan bentuk normalisasi struktur sosial. Ketika relasi gender tidak lagi dipersoalkan, di situlah hegemoni bekerja secara paling efektif. Otoritas kiai dan sistem pesantren diterima sebagai fondasi moral yang stabil tanpa refleksi atas implikasinya terhadap pembagian ruang sosial berbasis gender. Paradoks dalam novel ini tidak muncul melalui konflik terbuka, tetapi melalui stabilitas yang tampak netral. Modernitas pesantren dan keberhasilan pendidikan menjadi narasi utama yang menutupi kemungkinan kritik terhadap hierarki gender.

Ketiadaan problematisasi gender dalam narasi tidak berarti ketiadaan politik gender. Justru dalam stabilitas representasi itulah hegemoni bekerja secara efektif. Ketika pesantren digambarkan sebagai ruang meritokratis yang menjanjikan mobilitas sosial dan spiritual, pembaca diarahkan untuk memusatkan perhatian pada keberhasilan kolektif, bukan pada struktur yang memungkinkan keberhasilan itu. Absennya figur perempuan dari pusat narasi menegaskan bahwa subjek ideal yang dibentuk adalah subjek laki-laki Muslim yang disiplin dan visioner. Dengan

demikian, struktur maskulinitas tidak perlu diperdebatkan karena telah diasumsikan sebagai norma yang tak bermasalah.

Dalam *Kiai Tanpa Pesantren*, representasi otoritas religius mengalami pergeseran bentuk yang cukup signifikan. Kiai tidak lagi dilekatkan secara ketat pada struktur institusional pesantren yang hierarkis, tetapi hadir dalam ruang sosial yang lebih cair dan kultural. Otoritas dibangun melalui kedekatan personal, karisma spiritual, dan keteladanan moral dalam kehidupan sehari-hari. Relasi dengan masyarakat, termasuk perempuan, tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal, tetapi oleh jaringan kepercayaan dan pengakuan simbolik.

Pada tingkat permukaan, konfigurasi ini tampak lebih dialogis dan inklusif. Perempuan tidak selalu ditempatkan sebagai subjek yang harus dikontrol secara langsung melalui regulasi yang ketat. Ruang partisipasi sosial dan spiritual terlihat lebih terbuka dibandingkan dengan model pesantren tradisional yang lebih institusional. Namun, legitimasi moral tetap berpusat pada figur kiai. Penentuan batas kepantasan, penafsiran nilai, dan pengukuhan kesalehan tetap berada dalam orbit otoritas religius laki-laki.

Di sinilah paradoks muncul dalam bentuk yang lebih subtil. Transformasi dari otoritas institusional menuju otoritas karismatik tidak otomatis membongkar relasi kuasa gender. Ia hanya mengubah modus operasinya. Kontrol tidak lagi hadir dalam bentuk larangan formal atau disiplin struktural, tetapi melalui internalisasi nilai dan simbol kesalehan yang sulit dipersoalkan secara terbuka. Kebebasan perempuan bergerak dalam batas yang tetap ditentukan oleh legitimasi moral kiai meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Otoritas tidak hilang, hanya menjadi lebih cair dan karismatik meskipun tetap normatif.

Jika keempat novel dibaca secara komparatif, terlihat bahwa representasi kiai bergerak dalam spektrum yang luas, dari regulasi eksplisit hingga legitimasi simbolik yang halus. Dalam *Perempuan Berkalung Sorban*, makna dominan tentang kiai sebagai penjaga moral dihadirkan dalam struktur yang memungkinkan pembacaan oposisional melalui pengalaman perempuan. Dalam *Ayat-Ayat Cinta*, posisi hegemonik tentang moderasi dan perlindungan dibuka ruangnya untuk pembacaan negosiatif yang mempertanyakan paternalistiknya. Dalam *Negeri 5 Menara*, makna dominan tentang stabilitas pesantren bekerja secara hegemonik melalui normalisasi dan invisibilitas gender. Sementara itu, *Kiai Tanpa Pesantren* menampilkan *encoding* otoritas dalam bentuk karismatik yang membuka kemungkinan pembacaan ganda: sebagai pembaruan humanis sekaligus sebagai reposisi legitimasi patriarki.

Melalui kerangka Stuart Hall, keempat novel tersebut memperlihatkan bahwa representasi tidak pernah netral. Figur kiai di-*encode* dalam berbagai posisi ideologis yang memungkinkan pembacaan berbeda. Ada momen-momen ketika makna dominan diterima tanpa banyak gangguan, ada pula ruang-ruang tempat narasi membuka jarak kritis terhadap otoritas. Paradoks representasi kiai tidak terletak pada kontradiksi yang saling meniadakan, tetapi pada keberlangsungan dua fungsi sekaligus: sebagai penjaga nilai moral yang diakui dan sebagai medium reproduksi struktur gender hierarkis.

Dalam konteks yang lebih luas, dinamika ini berkaitan dengan transformasi otoritas Islam dalam budaya populer Indonesia. Identitas Muslim kontemporer dibentuk melalui negosiasi antara kesalehan, modernitas, dan ekspresi kultural. Novel-novel yang dianalisis memperlihatkan bahwa otoritas religius tidak ditolak secara frontal dalam ruang sastra populer, tetapi disesuaikan agar tetap selaras dengan wacana moralitas publik yang berubah. Krisis otoritas keagamaan pasca-Reformasi tidak selalu menghasilkan delegitimasi, tetapi sering kali mendorong reposisi simbolik yang lebih adaptif.

Politik gender dalam novel Indonesia masa Reformasi tidak bergerak dalam pola pembebasan yang linear. Ia lebih menyerupai medan negosiasi simbolik yang kompleks. Regulasi eksplisit dapat berubah menjadi pelunakan moderatif. Disiplin struktural dapat bergeser menjadi internalisasi nilai. Otoritas institusional dapat direposisi sebagai karisma personal. Akan tetapi, dalam seluruh variasi tersebut, figur kiai (atau otoritas keagamaan) tetap menjadi pusat produksi makna yang membingkai batas kepantasan dan agensi perempuan.

Jika dibaca sebagai satu kesatuan, keempat novel yang menjadi objek material dalam artikel ini memperlihatkan bahwa Reformasi tidak identik dengan disrupsi total terhadap otoritas religius. Yang berubah adalah cara otoritas itu berbicara tentang dirinya sendiri. Dari regulasi yang eksplisit menuju pelunakan moderatif, dari disiplin struktural menuju internalisasi nilai, dan dari institusionalitas menuju karisma personal, seluruh variasi tersebut tetap mempertahankan satu hal, yakni legitimasi moral kiai sebagai pusat rujukan. Politik gender dalam teks bukanlah arena pembalikan kuasa secara revolusioner, melainkan arena perundingan yang menghasilkan konfigurasi baru tanpa sepenuhnya menenggalkan yang lama.

Paradoks yang konsisten muncul dari pembacaan komparatif ini adalah bahwa perlindungan dan pengendalian tidak hadir sebagai dua hal yang saling bertentangan secara tegas, melainkan sebagai dua sisi dari mekanisme legitimasi yang sama. Kiai dapat tampil sebagai figur yang tulus menjaga nilai dan pada saat yang sama menjadi simpul normalisasi struktur gender hierarkis. Reformasi menggeser bentuk representasi, tetapi tidak sepenuhnya membongkar fondasi legitimasi simbolik yang menopangnya. Di sinilah kekuatan sastra bekerja: bukan dengan menawarkan jawaban final, melainkan dengan membuka ruang refleksi atas bagaimana agama, kekuasaan, dan gender terus berinteraksi dalam masyarakat Muslim Indonesia kontemporer.

#### D. Penutup

Kajian ini menunjukkan bahwa representasi kiai dalam novel Indonesia masa Reformasi bergerak dalam ketegangan yang konsisten antara legitimasi moral dan relasi kuasa gender. Reformasi 1998 memang membuka ruang kritik terhadap otoritas keagamaan, tetapi dalam ranah representasi sastra, perubahan tersebut tidak berujung pada pembongkaran struktur legitimasi patriarki secara menyeluruh. Yang tampak justru adalah proses adaptasi dan reposisi otoritas religius dalam bentuk yang lebih moderat, lebih disiplin, atau lebih karismatik-kultural. Otoritas tidak hilang; ia berubah modus dan cara kerjanya.

Paradoks utama terletak pada keberlangsungan dua fungsi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, kiai direpresentasikan sebagai penjaga nilai moral, simbol kesalehan, dan figur yang mengklaim perlindungan terhadap perempuan. Di sisi lain, figur yang sama berfungsi sebagai medium reproduksi batas-batas kepantasan dan agensi yang tetap hierarkis. Perlindungan dan pengendalian tidak tampil sebagai dua posisi yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua sisi dari mekanisme legitimasi simbolik yang sama. Dalam konteks ini, politik gender tidak hadir semata-mata sebagai konflik terbuka, tetapi sebagai proses normalisasi yang bekerja melalui bahasa moral, etika moderasi, disiplin institusional, maupun karisma personal.

Pembacaan komparatif terhadap *Perempuan Berkalung Sorban*, *Ayat-Ayat Cinta*, *Negeri 5 Menara*, dan *Kiai Tanpa Pesantren* memperlihatkan variasi bentuk representasi tersebut. Regulasi eksplisit terhadap tubuh perempuan, pelunakan paternalistik dalam wacana moderasi, normalisasi melalui invisibilitas gender, hingga reposisi otoritas dalam bentuk spiritualitas kultural menunjukkan bahwa Reformasi lebih banyak menggeser bentuk ekspresi otoritas daripada membongkar fondasi simboliknya. Dengan menggunakan kerangka representasi Stuart Hall, temuan ini menegaskan bahwa figur kiai dalam novel-novel tersebut merupakan hasil proses *encoding* ideologis yang membuka kemungkinan pembacaan hegemonik, negosiatif, maupun oposisional. Representasi kiai tidak pernah netral; ia selalu terikat pada kepentingan makna yang bekerja dalam konteks sosial tertentu.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penempatan figur otoritas religius sebagai pusat analisis dalam kajian gender sastra. Relasi gender dalam novel Indonesia masa Reformasi tidak dapat dipahami secara utuh apabila hanya berfokus pada representasi perempuan sebagai subjek pengalaman. Mekanisme simbolik yang memproduksi dan melegitimasi norma gender melalui figur kiai justru menjadi kunci untuk membaca bagaimana struktur kuasa dipertahankan, dinegosiasikan, atau dilembutkan. Dengan demikian, sastra Indonesia pasca-Reformasi tampil

sebagai arena negosiasi ideologis yang kompleks, tempat agama, kekuasaan, dan gender saling berkelindan tanpa selalu menghasilkan konfrontasi terbuka.

Pada akhirnya, paradoks representasi kiai dalam novel Indonesia masa Reformasi memperlihatkan bahwa transformasi sosial tidak serta-merta melahirkan transformasi struktural yang tuntas dalam relasi gender. Otoritas religius cenderung beradaptasi dengan konteks baru melalui reposisi simbolik yang lebih fleksibel, tetapi tetap mempertahankan pusat legitimasi moralnya. Di sinilah pentingnya membaca sastra sebagai praktik produksi makna: bukan untuk mencari jawaban normatif, melainkan untuk memahami bagaimana ideologi bekerja dalam bentuk yang halus, ambivalen, dan sering kali diterima sebagai kewajaran.

## Daftar Pustaka

- Al Hasany, I. S. (2019). *Kiai tanpa pesantren*. Telaga Aksara.
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi pesantren*. LP3ES.
- El Khalieqy, A. (2001). *Perempuan berkalung sorban*. Arti Bumi Intaran.
- El Shirazy, H. E. (2004). *Ayat-ayat cinta*. Republika.
- Erwin. (2024). Representasi gender dalam sastra Indonesia kontemporer. *Begibung: Jurnal Kajian Sastra*, 5(2), 134–148.
- Fauzi, A. (2023). Krisis otoritas keagamaan dan sastra Indonesia kontemporer. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 211–229.
- Fuadi, A. (2009). *Negeri 5 menara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. (2018). Pesantren dan pembentukan subjek Islam modern dalam novel Indonesia. *Sasdaya: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 2(2), 145–160.
- Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (Eds.), *Culture, media, language* (pp. 128–138). Hutchinson.
- Hall, S. (Ed.). (1997). *Representation: Cultural representations and signifying practices*. Sage.
- Hasbullah. (2019). Pesantren, gender, dan modernitas dalam sastra Indonesia. *Lingua*, 15(1), 77–90.
- Heryanto, A. (2015). Muslim identities and popular culture in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 43(126), 241–263.
- Jati, W. R. (2021). Otoritas keagamaan dan transformasi budaya pesantren. *Kawistara*, 11(3), 325–337.
- Mutia Sari, & Mardiansyah, D. (2024). Representasi gender di lingkungan pesantren dalam novel Dua Barista. *Jurnal Sastra dan Pendidikan Bahasa*, 8(1), 55–69.
- Muzakki, A. (2011). Islam populer dan wacana gender dalam sastra Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(2), 123–140.
- Nisa, E. F. (2020). Muslim women, authority, and gender discourse in Indonesian literature. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(2), 367–390.
- Normuliati. (2025). Representasi tokoh perempuan dan tradisi dalam sastra pesantren. *Jurnal Linguistik dan Sastra*, 6(1), 22–37.
- Nuruddin. (2020). Sastra Islam dan politik representasi gender. *Jurnal Bahasa dan Seni*, 48(1), 1–14.

- Sa'adah, W., Rengganis, R., & Ahmadi, A. (2025). Nilai pendidikan gender dalam novel karya Abidah El Khalieqy. *Alfabeta: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(1), 45–60.
- Umar, N. (2019). Perempuan dan kritik patriarki dalam sastra Islam Indonesia. *Humaniora*, 31(3), 291–303.
- Wardani, E. (2022). Representasi otoritas agama dalam novel Indonesia pasca-Reformasi. *Jurnal Poetika*, 10(2), 181–195.
- Wati, R. (2022). Relasi kuasa gender dalam novel berlatar pesantren. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 5(1), 67–80.
- Yusriyah, A. (2024). Representasi santri perempuan dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. *Socius: Jurnal Sosiologi Pendidikan Islam*, 5(2), 89–103.

### Informasi Penulis

#### Heru Marwata

Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Humaniora, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: [heru\\_marwata@ugm.ac.id](mailto:heru_marwata@ugm.ac.id)

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5620-4745>



**Open Access** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under a CC BY-SA 4.0 license. The images or other third-party material in this work are included under the Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material.